



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HAMZAH
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 507445

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.787.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/720 m2 di MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 1.722.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 391 m2/782 m2 di MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 251 m2/251 m2 di KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 145.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 377 m2/377 m2 di KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 225.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 377 m2/377 m2 di KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 195.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 433 m2/433 m2 di KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 235.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 433 m2/433 m2 di KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 165.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/500 m2 di KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 235.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 433 m2/433 m2 di KOTA MAKASSAR , WARISAN Rp. 185.000.000
10. Tanah Seluas 2500 m2 di MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
11. Tanah Seluas 10000 m2 di MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	210.000.000
1. MOBIL, AVANSA G Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. MOBIL, ZUSUKI OPEN CAP Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	190.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	21.898.486
F. HARTA LAINNYA	Rp.	120.000.000
Sub Total	Rp.	4.328.898.486
III. HUTANG	Rp.	150.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.178.898.486

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.